AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGAWASAN REALISASI DANA BOS

Yundri Akhyar[1]
[1]UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Yundri.akhyar@uin-suska.ac.id

Dikirim:
20-08-2025
Direvisi:
22-08-2025
Diterima:
28-08-2025
Diterbitkan:
30-08-2025

Abstract

This study aims to analyze the role of school committees in monitoring the implementation of the School Operational Assistance (BOS) funds in private Islamic schools in Pekanbaru. The research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with five members of the school committees directly involved in managing and supervising BOS funds. The findings reveal that school committees play three main roles: (1) a consultative role in providing input on funding priorities, (2) a control role in monitoring the alignment between budget realization and school activity plans, and (3) an advocacy role in bridging the interests of parents, the community, and schools regarding transparency and accountability in fund management. However, challenges remain, including limited technical understanding of BOS regulations among some committee members, lack of training, and tendencies toward formalistic participation. This study highlights the importance of enhancing the capacity of school committees through training and mentoring, as well as encouraging more active engagement to ensure transparency and accountability in BOS fund management are fully realized.

Keywords: *School Committee, BOS Funds, Supervision, Transparency, Islamic School*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite sekolah dalam pengawasan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah Islam swasta di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima orang anggota komite sekolah yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki tiga peran utama, yaitu: (1) peran konsultatif dalam memberikan masukan terkait prioritas penggunaan dana, (2) peran kontrol dalam memantau kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah, serta (3) peran advokatif dalam menjembatani kepentingan orang tua, masyarakat, dan sekolah terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Meskipun demikian, terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman teknis sebagian anggota komite mengenai regulasi dana BOS, kurangnya pelatihan, serta kecenderungan partisipasi yang bersifat formalitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas komite sekolah melalui pelatihan dan pendampingan, serta mendorong keterlibatan lebih aktif agar prinsip

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS benar-benar terwujud.
Kata Kunci: Komite Sekolah, Dana BOS

Pendahuluan

Tata kelola pendidikan (education governance) semakin menjadi perhatian utama dalam diskursus akademik global, khususnya terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Di negara berkembang, di mana investasi publik dalam pendidikan menjadi penggerak utama pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan dana operasional sekolah seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan alokasi, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat (World Bank, 2021; UNESCO, 2022). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai negara mendorong desentralisasi keuangan pendidikan dengan melibatkan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, agar dana publik benar-benar digunakan sesuai tujuan yang diharapkan.

Di Indonesia, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan sejak 2005 merupakan salah satu skema pendanaan pendidikan terbesar. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperluas akses pendidikan secara merata (Kemdikbud, 2020). Dana BOS disalurkan langsung ke sekolah dengan harapan dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, melainkan juga pada partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal. Dalam hal ini, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai lembaga representatif masyarakat untuk mengawasi perencanaan dan realisasi dana BOS.

sekolah dibentuk sebagai wadah partisipasi orang tua, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan pendidikan. Salah satu mandat pentingnya adalah memberikan masukan, dukungan, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi program sekolah, termasuk pengelolaan dana BOS. Idealnya, keberadaan komite sekolah menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa peran ini kerap tidak optimal karena keterbatasan kapasitas, kurangnya keterbukaan informasi, serta lemahnya mekanisme penguatan fungsi pengawasan (Rahman & Prasetyo, 2021; Suryadi, 2022).

Meskipun program BOS dianggap sebagai langkah progresif dalam desentralisasi keuangan pendidikan, pelaksanaannya masih menuai kritik. Laporan audit dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya masalah berulang seperti penyalahgunaan dana, pelaporan yang tidak akurat, serta lemahnya akuntabilitas di tingkat sekolah (BPK, 2021; Transparency International Indonesia, 2022). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana komite sekolah benar-benar berperan aktif dalam mengawasi realisasi dana BOS, ataukah keberadaannya hanya bersifat simbolis dan formalitas belaka.

Dalam praktiknya, ada sekolah yang berhasil mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel berkat peran komite sekolah yang proaktif, sementara di sekolah lain komite hanya berfungsi pasif. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas peran komite sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, permasalahan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komite sekolah dalam pengawasan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

realisasi dana BOS dan apa implikasinya terhadap tata kelola serta akuntabilitas keuangan pendidikan.

Kajian sebelumnya mengenai pengelolaan dana BOS sebagian besar berfokus pada aspek akuntabilitas keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta peran kepemimpinan sekolah (Nugroho, 2020; Wibowo & Harsono, 2021). Walaupun penting, kajian tersebut masih kurang menyoroti kontribusi spesifik komite sekolah sebagai lembaga pengawasan berbasis masyarakat. Literatur cenderung membahas permasalahan struktural program BOS, tetapi belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana mekanisme partisipatif, khususnya komite sekolah, berfungsi secara nyata dalam proses pengawasan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih bersifat deskriptif dengan menyoroti penyimpangan atau inefisiensi, tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara keterlibatan komite sekolah dengan tingkat keberhasilan realisasi dana BOS. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian dalam memahami efektivitas fungsi pengawasan komite sekolah. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara empiris peran komite sekolah dalam pengawasan dana BOS, sehingga memberikan kontribusi akademis maupun praktis terhadap perbaikan tata kelola pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite sekolah dalam pengawasan realisasi dana BOS. Tujuan spesifiknya meliputi:

1. Mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan komite sekolah dalam proses pengawasan dana BOS.
2. Mengungkap tantangan dan kendala yang dihadapi komite sekolah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Menilai implikasi peran komite sekolah terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan pendidikan di sekolah.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas pengawasan berbasis masyarakat dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengalihkan fokus analisis dari sekadar kepatuhan administrasi dan regulasi menuju efektivitas mekanisme partisipatif, yaitu komite sekolah, dalam menjamin akuntabilitas penggunaan dana BOS. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan teori tata kelola (governance) dan praktik partisipasi masyarakat dalam konteks pengawasan keuangan sekolah.

Novelty dari penelitian ini adalah penekanan pada peran komite sekolah sebagai aktor pengawasan yang aktif, bukan hanya simbolis, sehingga memperluas diskursus akademik mengenai tata kelola pendidikan berbasis masyarakat. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat fungsi komite sekolah sebagai pilar transparansi dan akuntabilitas pendidikan. Justifikasi penelitian ini semakin relevan mengingat meningkatnya tuntutan global terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan konteks Indonesia sebagai studi kasus, penelitian ini juga dapat memberikan pembelajaran bagi negara lain yang menerapkan skema pendanaan sekolah serupa.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Kajian Pustaka

1. Tata Kelola Pendidikan dan Akuntabilitas Keuangan

Tata kelola pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Prinsip utama tata kelola adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi (UNESCO, 2022). Dalam konteks pendanaan pendidikan, akuntabilitas keuangan menjadi instrumen kunci untuk memastikan dana publik dimanfaatkan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. World Bank (2021) menekankan bahwa lemahnya tata kelola keuangan pendidikan dapat menyebabkan inefisiensi, ketidakadilan distribusi, hingga penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penerapan prinsip governance dalam pendidikan memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat, baik secara internal maupun eksternal.

Di Indonesia, salah satu kebijakan desentralisasi keuangan pendidikan adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menyalurkan dana langsung ke sekolah. Program ini menuntut adanya akuntabilitas ganda: ke atas (kepada pemerintah) dan ke luar (kepada masyarakat). Dengan demikian, tata kelola keuangan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah dan bendahara, tetapi juga oleh lembaga representatif masyarakat yaitu komite sekolah (Kemdikbud, 2020).

2. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sejak diperkenalkan pada 2005, program BOS menjadi salah satu intervensi kebijakan terbesar di sektor pendidikan Indonesia. Tujuan utamanya adalah mengurangi beban biaya pendidikan bagi peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjamin pemerataan akses pendidikan (Kemdikbud, 2020). Secara struktural, dana BOS dapat digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pengadaan sarana pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan mutu guru dan siswa.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS masih menghadapi berbagai tantangan. Nugroho (2020) menemukan adanya kesenjangan antara pedoman penggunaan dana BOS dan praktik di lapangan, termasuk permasalahan dalam pelaporan dan audit. Demikian pula, Transparency International Indonesia (2022) melaporkan masih banyak kasus penyalahgunaan dana BOS, rendahnya keterbukaan informasi publik, serta lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

3. Peran Komite Sekolah dalam Tata Kelola Pendidikan

Komite sekolah merupakan lembaga representatif yang berfungsi sebagai wadah partisipasi orang tua, masyarakat, dan tokoh pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program sekolah. Menurut Rahman & Prasetyo (2021), komite sekolah memiliki tiga fungsi utama: (1) fungsi pemberi pertimbangan (advisory body), (2) fungsi pendukung (supporting body), dan (3) fungsi pengawasan (controlling body). Fungsi pengawasan inilah yang menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan dana BOS.

Penelitian Suryadi (2022) menunjukkan bahwa peran komite sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana apabila diberikan akses informasi yang memadai serta ruang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, di banyak sekolah, komite masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas SDM, minimnya literasi keuangan, serta rendahnya independensi terhadap pihak sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo & Harsono (2021) bahwa efektivitas komite sekolah sering kali hanya formalitas administratif, tanpa pengaruh signifikan dalam praktik pengawasan keuangan.

4. Pengawasan Dana BOS dan Tantangannya

Pengawasan dana BOS idealnya dilakukan secara berlapis: oleh pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme audit, serta oleh masyarakat melalui komite sekolah. Model pengawasan ganda ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana publik. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (2021) melaporkan bahwa permasalahan klasik seperti laporan fiktif, penggunaan dana tidak sesuai juknis, dan keterlambatan pelaporan masih sering terjadi.

Beberapa penelitian menyoroti bahwa efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi masyarakat. Jika komite sekolah bersifat aktif, maka transparansi dan akuntabilitas meningkat; sebaliknya, jika komite hanya pasif, maka peluang terjadinya penyimpangan semakin besar (Rahman & Prasetyo, 2021; Nugroho, 2020). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang menempatkan komite sekolah sebagai aktor pengawas, dengan realitas pelaksanaan di lapangan yang sering kali berbeda.

Berdasarkan kajian literatur, terlihat bahwa penelitian mengenai dana BOS lebih banyak berfokus pada kepatuhan administratif dan akuntabilitas keuangan sekolah secara umum (Nugroho, 2020; Wibowo & Harsono, 2021). Sementara itu, studi yang secara spesifik menyoroti peran komite sekolah sebagai lembaga pengawasan berbasis masyarakat masih terbatas. Selain itu, banyak penelitian bersifat deskriptif, tanpa analisis mendalam mengenai hubungan antara keterlibatan komite sekolah dengan efektivitas realisasi dana BOS.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif komite sekolah terhadap isu yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, dan interpretasi sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu digali melalui narasi dan pandangan subjek penelitian.

Partisipan penelitian terdiri atas lima orang komite sekolah yang dipilih dari beberapa sekolah Islam swasta di Pekanbaru. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan strategis di sekolah. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan, kredibel, dan kaya makna.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan, sekaligus memberi ruang bagi partisipan untuk

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

menyampaikan pandangan mereka secara lebih mendalam. Setiap wawancara berlangsung antara 45–60 menit, direkam dengan persetujuan partisipan, dan kemudian ditranskrip secara verbatim untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang meliputi tahapan membaca transkrip, mengidentifikasi kode, mengelompokkan kode menjadi tema, serta menafsirkan tema sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas kualitatif, peneliti menerapkan strategi triangulasi sumber dan member checking, yaitu mengkonfirmasi hasil interpretasi kepada partisipan agar makna yang diperoleh sesuai dengan pengalaman mereka.

Selain itu, aspek etika penelitian sangat diperhatikan. Identitas partisipan dijaga dengan menggunakan kode anonim, sementara keterlibatan mereka bersifat sukarela dan didahului dengan informed consent. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari pihak sekolah terkait, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor akademik yang bertanggung jawab.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran komite sekolah dalam mengawasi realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah Islam swasta di Kota Pekanbaru. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima orang informan yang merupakan ketua dan anggota komite sekolah di beberapa sekolah Islam swasta. Hasil wawancara menunjukkan beberapa tema utama: (1) persepsi terhadap peran komite sekolah, (2) mekanisme pengawasan dana BOS, (3) tantangan dan hambatan dalam pengawasan, serta (4) strategi komite sekolah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

1. Persepsi terhadap Peran Komite Sekolah

Mayoritas informan menyadari bahwa komite sekolah bukan hanya berfungsi sebagai simbol representasi masyarakat di sekolah, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan penggunaan dana BOS dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan prioritas pendidikan. Seorang ketua komite (Informan 1) menegaskan:

"Kami di komite sekolah merasa punya tanggung jawab untuk ikut memastikan dana BOS benar-benar dipakai sesuai kebutuhan siswa, bukan hanya administratif. Karena ini dana pemerintah, tentu harus transparan dan bermanfaat."

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa komite sekolah adalah watchdog yang harus ikut terlibat dalam menjaga akuntabilitas. Dari wawancara dengan Informan 2, juga ditegaskan bahwa peran komite tidak sekadar "menyetujui" laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa perencanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS sesuai dengan kebutuhan riil.

"Kalau hanya tanda tangan, tentu semua orang bisa. Tapi yang penting bagi kami adalah ikut dalam rapat perencanaan, memberikan masukan, dan kalau perlu bertanya kenapa anggaran dipakai untuk program tertentu."

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persepsi komite sekolah di sekolah Islam swasta di Pekanbaru cenderung menekankan fungsi partisipatif dan pengawasan yang kritis terhadap realisasi dana BOS.

Komite sekolah diposisikan sebagai representasi masyarakat yang berfungsi membantu, memberi masukan, sekaligus melakukan kontrol terhadap pengelolaan pendidikan, termasuk Dana BOS. Berdasarkan wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa komite sekolah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap rupiah Dana BOS digunakan sesuai dengan juknis yang berlaku. Salah seorang informan menekankan bahwa fungsi komite bukan hanya sebagai "stempel persetujuan" melainkan sebagai mitra kritis sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana.

Temuan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang menyebutkan bahwa komite sekolah memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator (Kemdikbud, 2016). Dalam konteks akuntabilitas, komite sekolah berperan menjaga transparansi serta mendorong sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2018) bahwa akuntabilitas pendidikan hanya dapat terwujud jika ada keterlibatan aktif masyarakat melalui wadah resmi seperti komite sekolah.

Selain itu, peran pengawasan oleh komite sekolah terhadap Dana BOS di sekolah swasta Islam Pekanbaru juga menjadi instrumen penting dalam memastikan prinsip good governance. Dalam teori manajemen publik, akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama tata kelola yang baik (Dwiyanto, 2017). Dengan demikian, keterlibatan komite sekolah dalam mengawal penggunaan Dana BOS mencerminkan implementasi good governance dalam bidang pendidikan.

2. Mekanisme Pengawasan Dana BOS

Hasil wawancara mengungkap bahwa mekanisme pengawasan dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu (a) keterlibatan dalam perencanaan anggaran, (b) monitoring pelaksanaan kegiatan, dan (c) evaluasi serta laporan pertanggungjawaban.

a) Keterlibatan dalam perencanaan

Sebagian besar informan menyebut bahwa mereka dilibatkan dalam rapat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Informan 3 menyatakan:

"Biasanya sebelum RKAS final, pihak sekolah mengundang komite untuk membahasnya. Kami diminta memberi masukan, terutama terkait kebutuhan siswa dan kegiatan yang benar-benar mendukung mutu pembelajaran."

Hal ini memperlihatkan adanya ruang dialog antara pihak sekolah dan komite dalam tahap perencanaan, meskipun intensitasnya berbeda antar sekolah.

b) Monitoring pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, komite sekolah berusaha mengawasi realisasi program melalui kunjungan, diskusi, dan laporan rutin. Informan 4 menuturkan:

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

"Kami memang tidak selalu bisa hadir mengawasi langsung semua kegiatan, tapi minimal kami meminta laporan bulanan dari bendahara sekolah. Kalau ada kegiatan besar, biasanya kami ikut meninjau."

Meskipun keterlibatan langsung terbatas, kehadiran komite dalam meminta laporan menunjukkan adanya kesadaran pengawasan berlapis.

c) Evaluasi dan pertanggungjawaban

Setelah program berjalan, laporan keuangan dipresentasikan kepada komite. Informan 5 menjelaskan:

"Di akhir semester atau tahun, pihak sekolah memberikan laporan penggunaan dana. Kami menilai apakah sesuai dengan RKAS atau tidak. Kalau ada perbedaan, kami tanya alasannya."

Mekanisme ini menunjukkan bahwa evaluasi komite masih lebih banyak berbentuk review dokumen dan diskusi, bukan audit independen. Namun, hal ini tetap penting untuk menegaskan transparansi.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi sebelumnya, namun juga menampilkan karakteristik khusus di konteks sekolah Islam swasta. Misalnya, penelitian oleh Rahayu (2019) menunjukkan bahwa komite sekolah di sekolah negeri lebih terstruktur dalam pengawasan BOS karena adanya dukungan langsung dari pemerintah. Sebaliknya, di sekolah swasta, terutama sekolah Islam, komite sekolah lebih bergantung pada inisiatif pribadi dan kesadaran kolektif.

Selain itu, penelitian ini menegaskan kembali hasil penelitian Sutomo (2020) yang menyatakan bahwa komite sekolah efektif meningkatkan transparansi penggunaan dana pendidikan jika mereka dilibatkan sejak tahap perencanaan. Hal yang sama juga ditemukan dalam wawancara ini, di mana informan menegaskan pentingnya keterlibatan sejak awal agar pengawasan lebih menyeluruh.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan aspek yang kurang banyak disorot dalam literatur, yaitu faktor budaya organisasi sekolah Islam swasta yang terkadang masih memandang komite hanya sebagai formalitas. Aspek ini menunjukkan adanya kebutuhan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika hubungan antara yayasan, sekolah, dan komite sekolah di konteks swasta berbasis keagamaan.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Pengawasan

Meskipun komite sekolah telah berusaha menjalankan fungsinya, hasil wawancara menunjukkan adanya sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas pengawasan.

a. Keterbatasan pemahaman teknis

Beberapa anggota komite mengaku tidak sepenuhnya memahami regulasi teknis terkait penggunaan dana BOS. Informan 2 mengungkapkan:

"Kadang kami bingung juga, apa saja sebenarnya yang boleh dibiayai BOS dan apa yang tidak. Jadi, kami hanya bisa mengandalkan penjelasan dari kepala sekolah atau bendahara."

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Keterbatasan pemahaman regulasi membuat komite cenderung pasif dan menerima penjelasan dari pihak sekolah tanpa mampu melakukan verifikasi mendalam.

b. Rendahnya intensitas keterlibatan

Kesibukan anggota komite yang sebagian besar berprofesi sebagai pegawai atau wiraswasta menyebabkan keterlibatan mereka tidak maksimal. Informan 3 menambahkan:

"Kami sebenarnya ingin lebih sering mengawasi, tapi karena ada pekerjaan lain, tidak bisa selalu hadir. Jadi, fungsi pengawasan kadang tidak berjalan optimal."

c. Relasi kekuasaan dengan pihak sekolah

Beberapa informan juga mengakui bahwa terdapat hambatan psikologis untuk mengkritisi sekolah terlalu jauh. Informan 1 menyebut:

"Kadang kami sungkan kalau harus mempertanyakan terlalu detail, takut dianggap mencampuri urusan internal sekolah."

Situasi ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara sekolah sebagai pengelola dana dengan komite sebagai pengawas.

Meskipun komite sekolah menyadari pentingnya peran mereka, wawancara menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam pengawasan Dana BOS. Pertama, keterbatasan pemahaman teknis mengenai juknis BOS. Dua dari lima informan menyatakan bahwa mereka sering kesulitan memahami detail aturan penggunaan BOS, sehingga pengawasan hanya bersifat administratif, bukan substantif.

Kedua, keterbatasan akses terhadap dokumen keuangan. Beberapa komite menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak selalu diberikan secara lengkap, dan terkadang hanya berupa ringkasan. Hal ini membuat mereka sulit melakukan verifikasi detail, misalnya terkait pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Fauzi (2020) yang menemukan bahwa partisipasi komite sekolah seringkali terhambat oleh kurangnya transparansi dari pihak sekolah.

Ketiga, adanya kendala budaya organisasi. Di beberapa sekolah, komite sekolah dipandang hanya sebagai formalitas untuk memenuhi aturan, sehingga peran kritis mereka kurang dihargai. Seorang informan bahkan menyebutkan bahwa ketika mereka mencoba memberi masukan, pihak sekolah kadang merasa terganggu. Hambatan ini menggambarkan adanya kesenjangan komunikasi dan perbedaan persepsi tentang fungsi komite sekolah.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori agency (Jensen & Meckling, 1976), di mana sekolah sebagai "agen" cenderung ingin mengendalikan informasi, sementara komite sebagai "principal" memiliki kepentingan untuk mengetahui dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai aturan. Konflik kepentingan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

4. Strategi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Transparansi

Meskipun menghadapi tantangan, komite sekolah mencoba mengembangkan strategi untuk tetap menjaga akuntabilitas penggunaan dana BOS.

a. Membangun komunikasi intensif dengan sekolah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Hampir semua informan menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan kepala sekolah dan bendahara. Informan 4 menyatakan:

"Yang paling penting menurut saya komunikasi. Kalau ada program baru, sekolah sebaiknya segera memberi tahu komite. Dengan begitu, tidak ada kesalahpahaman."

b. Mendorong keterbukaan laporan keuangan

Komite mendorong agar laporan keuangan bisa diakses tidak hanya oleh komite, tetapi juga orang tua murid. Informan 5 mengusulkan:

"Akan lebih baik kalau laporan penggunaan dana ditempel di papan informasi sekolah, supaya orang tua juga tahu. Ini akan membuat semua lebih transparan."

c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas

Beberapa komite menyarankan adanya pelatihan mengenai regulasi BOS agar mereka bisa lebih paham dalam mengawasi. Informan 2 menuturkan:

"Kalau ada pelatihan khusus tentang BOS, kami siap ikut. Dengan begitu, komite lebih percaya diri dalam menjalankan fungsi pengawasan."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah dalam pengawasan realisasi dana BOS di sekolah Islam swasta di Pekanbaru berada pada tingkat partisipasi terbatas. Di satu sisi, mereka memiliki kesadaran kuat untuk mengawal penggunaan dana agar tepat sasaran, tetapi di sisi lain, keterbatasan pemahaman teknis, intensitas keterlibatan, serta relasi kekuasaan membuat peran mereka belum optimal.

Kehadiran komite sekolah tetap memberikan nilai penting, terutama dalam menjaga transparansi melalui keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi. Namun, agar fungsi pengawasan benar-benar efektif, diperlukan penguatan kapasitas komite, peningkatan akses informasi, dan keberanian untuk bersikap kritis terhadap pihak sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah telah berperan dalam pengawasan dana BOS melalui keterlibatan di tahap perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Namun, peran ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman regulasi, intensitas keterlibatan, dan relasi kekuasaan. Strategi yang muncul antara lain membangun komunikasi intensif, mendorong keterbukaan laporan, dan meningkatkan kapasitas komite melalui pelatihan.Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas dan peran komite sekolah sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di seko Meskipun terdapat hambatan, wawancara juga menunjukkan adanya upaya-upaya positif yang dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pertama, komite sekolah berinisiatif mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai juknis BOS yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan Fitriani (2021) yang menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas komite melalui pelatihan dapat memperkuat kualitas pengawasan mereka.

Kedua, adanya forum komunikasi antar komite sekolah di Pekanbaru yang memungkinkan mereka saling berbagi pengalaman dan strategi pengawasan. Forum ini menjadi sarana peer

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

learning yang bermanfaat, khususnya bagi komite sekolah yang baru terbentuk atau masih lemah secara kapasitas.

Ketiga, peningkatan transparansi melalui penggunaan teknologi. Salah seorang informan menyebutkan bahwa sekolah mulai memanfaatkan media digital, seperti Google Drive atau grup WhatsApp, untuk membagikan laporan keuangan. Langkah ini membuat proses pengawasan lebih mudah, cepat, dan efisien. Implementasi teknologi dalam transparansi keuangan sejalan dengan gagasan e-governance yang dikemukakan oleh Heeks (2001), di mana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Selain itu, partisipasi komite sekolah dalam pengawasan BOS di sekolah Islam swasta juga memperkuat konsep community based education management. Menurut Tilaar (2012), pendidikan yang berbasis masyarakat hanya akan berhasil jika ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian, upaya kolaboratif komite sekolah tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan. lah Islam swasta.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam pengawasan realisasi Dana BOS di sekolah Islam swasta di Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan meskipun secara umum telah berfungsi sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil wawancara dengan lima informan dari komite sekolah menunjukkan bahwa keterlibatan komite tidak hanya terbatas pada persetujuan administratif, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan regulasi yang mengamanatkan komite sekolah sebagai mitra strategis dalam menjamin akuntabilitas publik pengelolaan dana pendidikan.

penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan, antara lain kurangnya pemahaman teknis sebagian anggota komite tentang mekanisme BOS, minimnya pelatihan terkait regulasi terbaru, serta ketergantungan informasi dari pihak sekolah. Faktor-faktor ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, terdapat pula praktik baik berupa keterbukaan laporan keuangan sekolah yang dibagikan secara berkala, sehingga memberikan ruang bagi komite untuk memberikan masukan yang konstruktif.

Temuan ini mempertegas bahwa penguatan kapasitas komite sekolah menjadi aspek krusial. Peningkatan literasi keuangan, sosialisasi regulasi BOS, dan keterlibatan lebih aktif dalam perencanaan program sekolah akan meningkatkan kualitas pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan komite sekolah bukan hanya formalitas, tetapi memiliki kontribusi nyata dalam menjaga agar realisasi dana BOS benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan berkelanjutan dari pemerintah dan dinas pendidikan dalam memperkuat kapasitas komite sekolah melalui pelatihan, monitoring, dan evaluasi yang sistematis, sehingga peran pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, objektif, dan berkelanjutan.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No.1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 29-40
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2021*. BPK RI.

Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi tata kelola pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fauzi, A. (2020). Partisipasi komite sekolah dalam pengawasan dana BOS. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 27*(2), 133–145.

Fitriani, R. (2021). Penguatan kapasitas komite sekolah melalui pelatihan manajemen BOS. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5*(1), 45–60.

Heeks, R. (2001). *Understanding e-Governance for development*. Manchester: Institute for Development Policy and Management.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. Jakarta: Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2020*. Jakarta: Kemdikbud RI.

Mulyasa, E. (2018). *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A. (2020). Financial accountability of BOS funds in public schools: A governance perspective. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 8*(2), 145–158. https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31260

Rahayu, D. (2019). Efektivitas komite sekolah dalam pengawasan dana BOS di sekolah negeri. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 24*(3), 211–223.

Rahman, H., & Prasetyo, Y. (2021). Peran komite sekolah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 15*(1), 25–38. https://doi.org/10.21009/jpk.v15i1.22100

Suryadi, B. (2022). Community participation and school governance: Evaluating the supervisory role of school committees in Indonesia. *International Journal of Educational Development, 92*, 102620. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102620

Sutomo, T. (2020). Peran komite sekolah dalam transparansi dana pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 16*(2), 112–127.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Manajemen pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.

Transparency International Indonesia. (2022). *Laporan integritas sektor pendidikan Indonesia 2022*. Jakarta: TII.

UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Accountability in education*. Paris: UNESCO Publishing.

Wibowo, A., & Harsono, M. (2021). Governance and transparency in the management of BOS funds: Challenges and opportunities. *Journal of Educational Administration Research and Review, 5*(2), 78–89. https://doi.org/10.17509/jear.v5i2.36650

World Bank. (2021). *Improving education finance management in developing countries*. Washington, DC: World Bank Group.